

Judul : Calon hakim konstitusi: DPR minta Inosentius kawal UU agar tak mudah dibatalkan MK
Tanggal : Jumat, 22 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

CALON HAKIM KONSTITUSI

DPR Minta Inosentius Kawal UU agar Tak Mudah Dibatalkan MK

JAKARTA, KOMPAS — DPR menyetujui Inosentius Samsul sebagai hakim konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada 3 Februari 2026. Sebagai pengganti, DPR meminta Inosentius mengawal undang-undang agar tidak mudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Inosentius yang digelar sehari sebelumnya. Ia menyebut proses uji kelayakan dan kepatutan berlangsung transparan dari seluruh anggota Komisi III sebagai menetapkan Inosentius sebagai hakim MK.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPR. "Apakah laporan Komisi III DPR terhadap hasil pembahasan pergantian hakim konstitusi usulan DPR disetujui?" tanyanya, yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

Seperti diberitakan, Arief akan memasuki masa purnatugas pada 3 Februari 2026 saat ia genap berusia 70 tahun. Sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat, salah satunya ketika mencapai usia 70 tahun.

Sesuai rapat paripurna, Habiburokhman menyampaikan, proses selanjutnya diserahkan kepada pemerintah untuk menerbitkan keputusan presiden tentang penetapan Inosentius menjadi hakim MK. Mengenai waktu pelantikan Inosentius

juga diserahkan kepada pemerintah.

Habiburokhman menambahkan, DPR sejak awal menginginkan kehadiran Inosentius dapat memberikan warna sekaligus pemahaman baru terhadap proses penyusunan undang-undang yang kerap menjadi obyek uji materi di MK. Inosentius memiliki pengalaman panjang lebih dari tiga dekade di DPR sebagai perumus dan peneliti legislasi.

"Kalau Pak Sensi (sapaan akrab Inosentius) 35 tahun ada di DPR, dia tahu kalau mau dikejar ke mana pun, ditanya soal persoalan di undang-undang, Pak Sensi ini tahu," ujar Habiburokhman.

Proses politik

Habiburokhman menilai kehadiran Inosentius penting karena hakim MK saat ini sering kali tidak mendalami berbagai aspek teknis, substansi, ataupun politik dalam proses penyusunan undang-undang.

"Jadi beliau (Inosentius) paham banget menjadi hakim

konstitusi itu. Masalah di hakim konstitusi sekarang, termasuk Saudara Arsul Sani (hakim konstitusi usulan DPR) itu, mereka itu sebetulnya enggak bisa paham apa persoalan teknis, apa persoalan substansi, apa persoalan politik di DPR ini, dalam penyusunan undang-undang, sehingga hal-hal teknis itu dikejar-kejar, digebay-gebay sebagai kesalahan yang akhirnya dijadikan dasar untuk membatalkan undang-undang," kata Habiburokhman.

Undang-undang yang lahir dari aspirasi rakyat, menurut dia, perlu dikawal agar tidak

mudah dibatalkan MK hanya karena tuduhan ketidaksempurnaan teknis.

"Aspirasi rakyat ini, kan, harus dikawal ketika berwujud undang-undang. Hal-hal substansi yang berpihak kepada rakyat jangan sampai diubah hanya karena tuduhan ketidaksempurnaan dalam perumusan teknis. Kan, susah jika sudah demikian, kadang-kadang masih tidak *meaningful participation* dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus yang menurut saya bisa dibawa oleh Pak Inosentius Samsul di MK," katanya.

Saat uji kelayakan pada Rabu (20/8), Komisi III DPR berulang kali mengingatkan Inosentius agar tidak justru "menghantam" DPR setelah terpilih. Sejumlah anggota juga menyampaikan kegelisahan atas situasi di MK saat ini, di mana putusan hakim dinilai melampaui kewenangan dan kerap masuk ke ranah teknis.

Inosentius mengaku memahami, para anggota DPR telah bekerja dengan baik dalam menghasilkan undang-undang. "Jadi semua

orang bisa berpendapat bahwa DPR itu jelek, itu betul, itu hak. Tetapi jangan lupa, mereka juga di sini bekerja luar biasa, menghasilkan undang-undang, dan itu saya alami sendiri membantu anggota Dewan," katanya.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Allan FG Wardhana, berpendapat, jika menjadi hakim MK, Inosentius idealnya tidak menguji undang-undang yang pernah ia susun atau terlibat dalam pembahasan. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan. (DOW)